

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bimbingan dan konseling sebagai sebuah layanan profesional dituntut untuk dapat mengembangkan model layanan yang dapat memenuhi tuntutan abad 21, yang terdiri dari kebutuhan akan kejelasan tujuan dan misi, kebutuhan akan kerangka kerja bimbingan dan konseling komprehensif, kebutuhan akan akuntabilitas, kebutuhan advokasi, kebutuhan melayani semua siswa, dan visi bimbingan dan konseling (Kartadinata, t.t, hlm. 7). Visi bimbingan dan konseling pada abad 21 melibatkan peran konselor yang aktif sebagai pelaksana layanan yang dapat meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh. Dalam hal ini, konselor ialah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling/konselor (Permendikbud No. 111 Tahun 2014). Meskipun terqualifikasi sebagai pendidik yang setara dengan guru, dosen, pamong belajar, dan lain lain, konselor memiliki peran dan ekspektasi kinerja yang unik.

Kinerja merupakan kemampuan yang ditunjukkan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan. Kinerja menjadi salah satu indikator bagaimana keefektifan peran konselor sebagai pelaksana layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ekspektasi kinerja konselor dalam bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan (Permendiknas No. 27 Tahun 2008).

Menurut Saondi & Suherman (2009, hlm. 24) kinerja guru atau pendidik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kepribadian dan dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan mengajar, komunikasi, hubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, kesejahteraan, dan iklim kerja. Konselor yang juga terqualifikasi sebagai pendidik, kinerjanya juga akan dipengaruhi faktor-faktor tersebut, salah satunya pengembangan profesi. Dalam konteks komponen layanan program

bimbingan dan konseling, pengembangan profesi menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pengembangan profesionalitas dalam dukungan sistem. Pengembangan profesi yang dimaksud dapat berupa aktif dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan ilmiah, dan melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Depdiknas, 2008, hlm. 213).

Pengembangan profesi yang dilaksanakan dengan tepat dapat meningkatkan kualitas kinerja dan memenuhi standar kualifikasi akademik dari konselor. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal ialah sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta berpendidikan profesi konselor. Karena itu, kinerja konselor yang efektif dapat diukur berdasarkan standar kualifikasi akademik yang telah dicapainya.

Faktanya, masih banyak guru BK yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik konselor. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tahun 2015 pada sebagian guru BK di SMA pada beberapa kecamatan di Kabupaten Purwakarta, masih banyak guru BK yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan, seperti guru BK yang berasal dari S1 bidang Pendidikan Agama Islam, maupun yang berasal dari guru mata pelajaran lain, seperti guru TIK dan guru Bahasa Indonesia. Berdasarkan data statistik guru pada tahun 2013, dari 278.711 jumlah guru SMA dan 596.089 jumlah guru SMP se-Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2015), jumlah guru bimbingan dan konseling hanya sekitar 33.000 orang. Sedangkan, data guru bimbingan dan konseling di Purwakarta yang terhimpun dalam MGBK Kabupaten Purwakarta sebanyak 40 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Murad (2011) terhadap 64 konselor SMAN di kota Bandung, Malang, dan Padang, latar belakang pendidikan BK memberikan pengaruh pada pencapaian tingkat kinerja konselor profesional yang tinggi. Tingkat kinerja konselor yang profesional yang berlatar belakang pendidikan BK berada pada taraf tinggi, sedangkan tingkat kinerja konselor yang bukan berlatar pendidikan BK hanya berada pada taraf sedang. Meskipun dalam hasilnya tingkat kinerja cenderung bervariasi berdasarkan dimensinya, secara umum tingkat kinerja konselor profesional berada pada tingkat sedang. Selain itu,

penelitian yang dilakukan Apriliyanto (2012, hlm. 6) menunjukkan bahwa kinerja konselor lulusan PPK masuk kategori tinggi dan yang belum menempuh PPK masuk kategori sedang, dan hasilnya perbedaan kinerja konselor dalam melaksanakan layanan perorangan sangat signifikan.

Komponen lain yang berkaitan dengan kualifikasi akademik konselor ialah sertifikasi. Sertifikasi sebagai bentuk peningkatan profesionalitas konselor merupakan pengakuan terhadap seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) program studi Bimbingan dan Konseling yang terakreditasi (Depdiknas, 2008, hlm. 277). Pelaksanaan sertifikasi konselor pun masih belum optimal. Padahal, sertifikasi konselor memberikan hubungan yang positif signifikan baik dengan kemampuan guru BK dalam penyusunan program BK di sekolah (Priyanto, Hartati & Suharso, 2012, hlm. 1) maupun dengan kinerja konselor di sekolah (Kanto, 2015, hlm. 62).

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi kinerja konselor ialah bagaimana bentuk hubungan antara konselor dengan asosiasi profesi. Adanya kerjasama antara konselor sekolah dengan asosiasi profesi akan mendukung peningkatan profesional konselor, baik dalam bentuk diskusi asosiasi profesi maupun program pendidikan konselor sebagai bentuk pengembangan profesi (Darcy & Faghri, 2013, hlm. 152). Hal lain yang juga mempengaruhi tingkat kinerja konselor ialah iklim kerja sekolah, motivasi kerja, kepuasan guru, dan pelaksanaan supervisi BK (Gede & Ardika, 2010, hlm. 1636; Wirata, Natajaya, & Dantes, 2015, hlm. 10).

Pelaksanaan supervisi BK merupakan bentuk penilaian terhadap kinerja konselor di sekolah. Supervisi bimbingan dan konseling merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang ahli untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan dalam bimbingan dan konseling, baik dalam aspek pelaksanaan program maupun akuntabilitas konselor sebagai pelaksana program yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan/kompetensi guru BK atau konselor untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pada hakikatnya, tujuan supervisi dalam BK ialah untuk memfasilitasi pengembangan

pribadi dan professional konselor, meningkatkan kompetensi konselor, dan meningkatkan program dan layanan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan (Bradley & Boyd, 1989, hlm. 8).

Supervisi yang dilaksanakan haruslah supervisi yang memang memiliki kompetensi untuk dapat mengawasi profesionalitas konselor di sekolah, dan tidak dilakukan oleh supervisor yang sama yang mengevaluasi guru-guru lainnya, agar relevan dengan peran atau tugas konselor sekolah itu sendiri (Struder & Sommers, 2000, hlm. 93). Tetapi pelaksanaan supervisi BK pun memiliki kendala, yaitu instrumen yang digunakan belum bisa mengungkap kinerja secara lebih dalam, baik pada variabel penyusunan program maupun layanan bimbingan dan konseling (Ulfa, Sugiyo, & Purwanto., 2014, hlm. 60) serta rendahnya motivasi dan komitmen guru BK (Reza & Sugiyo, 2015, hlm. 26). Meskipun begitu, sudah ada bentuk evaluasi yang dilakukan oleh supervisor BK itu sendiri maupun dari siswa (Swank, 2014, hlm. 17) sehingga penilaian dilakukan baik dengan teknik keberhasilan guru BK maupun kepuasan siswa terhadap layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua siswa di SMA yang berbeda dan latar belakang guru BK yang berbeda yang dilakukan untuk melihat kepuasan siswa terhadap kinerja konselor, siswa yang bersekolah di SMAN 1 Purwakarta memiliki kepuasan yang cukup terhadap kinerja guru BK, dan mayoritas guru BK memiliki latar belakang bimbingan dan konseling. Sedangkan siswa yang bersekolah di SMAN 2 Purwakarta memiliki kepuasan yang baik terhadap kinerja guru BK, tetapi mayoritas guru BK tidak memiliki latar belakang bimbingan dan konseling. Karena itu, kinerja konselor di sekolah menengah, terutama sekolah menengah atas (SMA) negeri perlu ditingkatkan agar dapat mengembangkan persepsi yang positif dari siswa terhadap bimbingan dan konseling. Hal itu didukung dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa konselor yang berada pada sekolah negeri (*public school*) memiliki kecenderungan tingkat kepercayaan diri yang rendah untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling secara luas pada siswa yang terdiagnosis memiliki gangguan kesehatan mental (Carlson & Kees, t.t, hlm. 220).

Apabila kinerja konselor dikaitkan dengan jenjang pendidikan, konselor memiliki ekspektasi kinerja dengan perbedaan yang khas di setiap jenjangnya.

Pada jenjang taman kanak-kanak, kegiatan konselor dalam *responsive service* dilaksanakan terutama untuk memberikan layanan konsultasi kepada guru dan orang tua dalam mengatasi perilaku mengganggu siswa taman kanak-kanak. Pada jenjang sekolah dasar, konselor dituntut memosisikan diri sebagai konselor kunjung yang membantu guru untuk mengatasi perilaku mengganggu. Pada jenjang sekolah menengah, peran konselor diantaranya *men-support* perkembangan aspek-aspek pribadi sosial, karir, dan akademik siswa, melalui pengembangan menu program bimbingan dan konseling, bantuan kepada siswa dalam *individual student planning*, pemberian layanan responsif, serta pengembangan *system support* yang juga diharapkan menjalankan semua fungsi bimbingan dan konseling, yang meliputi fungsi preventif, *developmental*, maupun kuratif (Depdiknas, 2008, hlm. 92).

Pengembangan profesi yang menjadi salah satu faktor penentu kinerja konselor di sekolah menjadi perhatian utama pada penelitian ini. Pengembangan profesi yang dimaksud ialah latar belakang pendidikan yang sudah ditempuh oleh guru BK atau konselor sebelumnya. Karena masih banyaknya guru BK atau konselor di sekolah, terutama di tingkat sekolah menengah atas (SMA) negeri yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan standar kualifikasi akademik, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk menggambarkan kinerja konselor SMA Negeri se-Kabupaten Purwakarta berdasarkan latar belakang pendidikannya, baik S1 dalam bidang Bimbingan dan Konseling atau bidang lain, serta pengalaman menempuh sertifikasi.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Seperti apa profil kinerja konselor SMA Negeri se-Kabupaten Purwakarta?
2. Apakah ada perbedaan antara kinerja konselor SMA Negeri se-Kabupaten Purwakarta yang memiliki latar belakang pendidikan BK dan non-BK?
3. Apakah ada perbedaan antara kinerja konselor SMA Negeri se-Kabupaten Purwakarta yang sudah mengikuti sertifikasi dengan yang belum mengikuti sertifikasi?

4. Apakah ada perbedaan antara kinerja konselor SMA Negeri se-Kabupaten Purwakarta laki-laki dengan perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan profil kinerja konselor di SMA Negeri se-Kabupaten Purwakarta. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan profil kinerja konselor SMA Negeri se-Kabupaten Purwakarta.
2. Menggambarkan perbedaan kinerja konselor SMA Negeri se-Kabupaten Purwakarta yang memiliki latar belakang pendidikan BK dan non-BK.
3. Menggambarkan perbedaan kinerja konselor SMA Negeri se-Kabupaten Purwakarta yang sudah mengikuti sertifikasi dan belum mengikuti sertifikasi.
4. Menggambarkan perbedaan kinerja konselor SMA Negeri se-Kabupaten Purwakarta laki-laki dan perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Memberikan gambaran mengenai kinerja konselor berdasarkan latar belakang pendidikan dan sertifikasi sebagai bentuk pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling dalam ruang lingkup konselor.

2. Manfaat praktis:

- a. Untuk guru BK, menjadi acuan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah serta memberi motivasi untuk dapat berkuliah kembali sesuai dengan pekerjaannya.

- b. Untuk supervisor BK, memberikan informasi awal bagi penilaian kinerja konselor di sekolah.
- c. Untuk MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) Kabupaten Purwakarta, menjadi acuan dasar untuk mengembangkan pelatihan sebagai usaha peningkatan kinerja konselor.
- d. Untuk peneliti selanjutnya, mengembangkan penelitian dengan variabel lain yang terkait dengan kinerja konselor.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi pada skripsi ini terdiri dari 5 Bab.

Bab 1 berisi pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

Bab 2 berisi kajian pustaka. Bab ini memuat konteks yang jelas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta berisikan konsep-konsep bidang yang dikaji, penelitian terdahulu yang relevan, serta posisi teoretis.

Bab 3 berisi metode penelitian. Bab ini memuat rancangan alur penelitian, mulai dari pendekatan yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahap pengumpulan data, hingga langkah-langkah analisis data.

Bab 4 berisi temuan dan pembahasan. Bab ini memuat hasil pengolahan dan analisis data sesuai rumusan masalah penelitian, dan pembahasan memuat jawaban pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab 5 berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi. Bab ini memuat simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian.